

ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

ABSTRAK

Heriansyah *

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum hak menguasai negara atas tanah, bagaimana penguasaan hak atas tanah dari segi yuridis-teoritis, bagaimana penguasaan hak atas tanah dalam perspektif konstitusi .

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan hukum hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA juga menyebutkan bahwa tanah yang di kuasai oleh negara merupakan penjabaran dari hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa. Tanah negara sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UUPA. Penguasaan hak atas tanah dari segi yuridis-teoritis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di haki, misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di haki, tidak diserahkan kepada orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penguasaan hak atas tanah dalam perspektif konstitusi adalah hak menguasai negara khususnya dibidang pertanahan merupakan hak yang diberikan kepada negara untuk pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata Kunci: Pembaharuan, Hak, Tanah.

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

JURIDICAL ANALYSIS OF LAND RIGHTS TENURE IN A STATE LEGAL PERSPECTIVE

ABSTRACT

Heriansyah *

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates the state that everything related to land as part of the earth, water and natural resources contained therein in Indonesia must and must be managed and utilized for the greatest prosperity of the Indonesian people. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law of the state's right to control over land, how to control land rights from a juridical-theoretical perspective, how to control land rights from a constitutional perspective.

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The legal regulation of the state's right to control over land is regulated in Article 1 and Article 2 of the UUPA which also states that land controlled by the state is an elaboration of the state's right to control over earth, water and space. State land as land directly controlled by the state is land that is not attached with any land rights, as stipulated in the BAL. Mastery of land rights from a juridical-theoretical point of view is control based on rights, which is protected by law and generally gives authority to the right holder to physically control the land that is claimed, for example the land owner uses or takes advantage of the land that is claimed, not handed over to others.

The results of the study show that control of land rights in a constitutional perspective is the right to control the state, especially in the field of land, which is a right given to the state for management (bestuursdaad), regulation (regelendaad), management (beheersdaad), and supervision (toezichthoudensdaad) for the greatest possible purpose. people's prosperity.

Keywords: Renewal, Rights, Land..

** Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra.*